**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN REGIONAL DAN KONVERGENSI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA 2002-2011**

Oleh:

Muhammad Anwar Solichin 1)

1) Biro Pusat Statistik Kabuten Banjarnegara

Email: anwar7360@gmail.com

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze economic growth, regional inequality and convergence across sub-districts in the district Banjarnegara years 2002 – 2011. It is important to know the impact of the regional development process. The imbalance development between districts led to the increase in income inequality..The analytical tool used is economic growth , Typology Klassen , Williomson Index , Theil Entropy Index and Convergence. This study also analyzes the relationship between growth and inequality of income of using Pearson correlation analysis*.

***Keywords****: economic growth, income inequality, convergence*

**INTRODUCTION**

Pembangunan adalah proses transformasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu bagian penting dari pembangunan nasional tersebut adalah pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat. Dimana kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan dari perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menggambarkan terciptanya suatu proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi output, peningkatan jumlah konsumsi, dan peningkatan pendapatan (Sukirno, 2010:10)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah yang mencerminkan peningkatan kemampuan produksi riil masyarakat dan dinamika perekonomian suatu daerah. Perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan tumbuh dan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang naik. Namun demikian, tidaklah berarti pendapatan perkapita akan mengalami kenaikan terus-menerus. Perekonomian dapat mengalami penurunan tingkat kegiatan ekonomi karena disebabkan adanya resesi ekonomi, kekacauan politik dan penurunan ekspor. Jika keadaan demikian hanya bersifat sementara dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun, maka masyarakat dapat dikatakan mengalami pembangunan ekonomi (Arsyad, 1999:25). Meningkatnya aktivitas perekonomiam daerah memberikan implikasi pada peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan perkapita masyarakat. Apabila terjadi distribusi pendapatan yang sempurna (*absolute equality*) maka setiap orang akan menerima pendapatan yang sama, tetapi angka pendapatan perkapita yang ada sekarang merupakan angka rata-rata yang tidak mencerminkan pendapatan yang diterima oleh tiap penduduk.

Meningkatnya aktivitas perekonomiam daerah memberikan implikasi pada peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan perkapita masyarakat.Apabila terjadi distribusi pendapatan yang sempurna (*absolute equality*) maka setiap orang akan menerima pendapatan yang sama, tetapi angka pendapatan perkapita yang ada sekarang merupakan angka rata-rata yang tidak mencerminkan pendapatan yang diterima oleh tiap penduduk.

Kuznet mngemukakan pendapatnya dengan hipotesis U-terbalik, bahwa tahap awal pembangunan akan ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan disertai tingkat ketimpangan yang tinggi pula.Dalam hal ini kebijakan yang memaksimalkan pertumbuhan dapat berakibat buruk bagi pemerataan. Keadaan yang demikian disebut sebagai *trade off* antara pertumbuhan dan pemerataan (Suparmoko, 1990). Apabila suatu negara menghendaki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka seringkali pemerataan diabaikan karena pemerintah cenderung berkonsentrasi pada peningkatan pertumbuhan sehingga terjadilah ketimpangan antar daerah. Tetapi dalam jangka panjang, pada saat kondisi ekonomi menuju kedewasaan dan dengan asumsi mekanisme pasar bebas dan mobilitas semua faktor-faktor produksi antar daerah tanpa sedikitpun rintangan atau distorsi, maka perbedaan dalam laju pertumbuhan output antar daerah cenderung mengecil bersamaan dengan tingkat pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi disetiap daerah yang akhirnya mengurangi kesenjangan ekonomi regional (pemerataan). Proses inilah yang disebut dengan konvergensi (Tambunan,2001:271).

Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya alam dengan varian yang beragam dan potensial dikembangkan namun ironisnya Kabupaten Banjarnegara masih tergolong daerah dengan laju ekonomi yang relatif kecil. Di era otonomi daerah ini, diharapkan Kabupaten Banjarnegara mengalami percepatan pembangunan. Data PDRB dan pertumbuhan ekonomi kabupaten Barlingmascakeb selama lima tahun terakhir menunjukan arah yang lebih baik. Sejak tahun 2007 Perkembangan perekonomian yang meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan pertumbuhan ekonomi dari empat kabupaten tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Sejak ditetapkan Undang-undang No. 25 / Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang No. 32 / Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, perkembangan ekonomi juga terjadi pada Kabupaten Banjarnegara, namun demikian sejalan dengan diterapkannya Otonomi Daerah sejak tahun 2004 kesenjangan antar daerah justru semakin meningkat.Pada Tabel 1 menunjukan bahwa Kabupaten Banjarnegara memiliki pertumbuhan positif,tetapi rata-rata pertumbuhan ekonominya nomor dua dari bawah, yaitu 4,98 persen. Pada tahun 2007-2011 Kabupaten Banjarnegara mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 5,11 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang rendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 4.89 persen.

Kabupaten diwilayah Barlingmascakeb yang memiliki rata-rata pertumbuhan yang paling tinggi adalah Kabupaten Purbalinga sebesar 5,82 persen.Di Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 6,19 persen dan pertumbuhan ekonomi yang terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 5,30 persen. Perbedaan pertumbuhan antar kabupaten dikarenakan adanya perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki dan faktor-faktor produksi di masing-masing wilayah/kabupaten. Perbedaan tingkat pertumbuhan akan mendorong pelaksanaan pembangunan yang berbeda dari masing-masing daerah yang akhirnya berdampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan.

Perbedaan karakteristik dan potensi sumber daya alam yang berbeda tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Tabel 2 menjelaskan bahwa terdapat daerah yang memiliki PDRB sangat tinggi pada tahun 2011 yaitu Kecamatan Banjarnegara sebesar 422.093,98 dan Kecamatan Purworejo Klampok sebesar 335.075,18. Sedang kecamatan yang memiliki PDRB terendah adalah Kecamatan Pandanarum sebesar 30.300,34 dan Kecamatan Pagedongan sebesar 41.002,06. Hal ini membuktikan telah terjadi ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banjarnegara bila dilihat dari nilai PDRB. Ketipangan antar kecamatan disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan tingkat pembangunan yang akan membawa dampak perbedaan kemakmuran antar kecamatan. Beranjak dari hal tersebut perlu diadakan pengkajian atau analisis ketimpangan regional di Kabupaten Banjarnegara agar dapat diketahui arah pertumbuhan ekonomi,klasifikasis kecamatan,ketimpangan regional dan konvergensi /divergensi di Kabupaten Banjarnegara.

**METODE ANALISIS**

Untuk mengukur ketimpangan antar wilayah dugunakan alat yaitu indeks Williamson (*Williamson variation*) dan indeks Entropi Theil .

**1. Indeks Williamson**

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terjadi dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional in equality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Indeks Williomson menunjukkan indeks variasi pendapatan antar wilayah dalam suatu negara. Adapun rumus Variasi Williomson (Sjafrizal, 1997: 31) adalah sebagai berikut;

.................(1)

Keterangan :

Wi = Variasi Williamson

*yi* = Pendapatan per kapita di kecamatan ke i

*y* = Pendapatan per kapita Kabupaten

*fi* = Jumlah penduduk kecamatan ke i

*n* = Jumlah penduduk Kabupaten

KriteriaPengujian :

1. Jika Wi semakin kecil atau mendekati nol menunjukan ketimpangan ketimpangan semakin kecil/ semakin merata.
2. Jika Wi semakin jauh dari nol menunjukan ketimpangan semakin melebar.

**2. Indeks Ketimpangan Entropi Theil**

Indeks Ketimpangan Entropi Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu. Indeks Ketimpangan Entropi Theil juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu; sedang yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ketimpangan spasial. Sebagai contoh kesenjangan/ketimpangan antardaerah dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan (Kuncoro, 2012: 87).

Adapun rumus Indeks Ketimpangan Entropi Theil (Ying,2000:60)) adalah sebagai berikut ;

I(y)= ∑ (*yj*/Y)*x*log[(*yj*/Y)/(*xj*/X)]...........(2)

Keterangan ;

I(*y*) = Indeks ketimpangan Entropi Theil

*y*j = PDRB per kapita kecamatan j

*y* = Rata-rata PDRB per kapita Kabupaten

*x*j = Jumlah penduduk kecamatan j

X = Jumlah penduduk Kabupaten

**HASIL ANALISIS**

**1. Analisis Tipologi Klassen**

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Kabupaten Banjarnegara selama periode penelitian (2002-2011) dari hasil penghitungan dan analisis terlihat bahwa masih adanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang berbeda antar kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Beberapa kecataman masuk ke dalam daerah berkembang, daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, serta daerah relatif tertinggal. Masih adanya kecamatan yang termasuk dalam empat klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa belum terjadi pertumbuhan yang belum merata antar kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Diperlukan penanganan yang lebih serius dari pihak terkait untuk mengejar ketertinggalan dari daerah yang relatif tertinggal agar bisa sejajar dengan pertumbuhan kecamatan lain yang lebih maju baik dari pertumbuhan maupun pendapatan per kapita.

Berdasarkan tabel 1 dapat digambarkan pola dan struktur perekonomian berdasarkan analisis Tipologi Klassenselama periode penelitian (2002-2011) yang termasuk dalam daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh adalah Kecamatan Banjarnegara, Sigaluh, Madukara dan Pejawaran. Kecamatan ini memiliki tingkat pendapatan perkapita tinggi dan pertumbuhan ekonomi juga tinggi dibandingkan dengan rata-rata kabupaten.

Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Banjarnegara sebesar 6,06 persen dengan pendapatan per kapita sebesar Rp4.342.989,Kecamatan Sigaluh pertumbuhan ekonominya sebesar 5,92 persen dengan pendapatan per kapita Rp2.697.404, Kecamatan madukara pertumbuhan ekonominya 7,83 persen dan pendapatan per kapita Rp2.821.485 dan Kecamatan Pejawaran pertumbuhan ekonominya sebesar 7,91 persen dengan pendapatan perkapita Rp 3659.806.

Daerah tersebut termasuk dalam katagori kecamatan yang mandiri dan maju pesat dan juga akan sangat menarik bagi para investor swasta dan mempunyai potensi fiskal yang menjanjikan, sehingga kerja sama antara swasta dan pemerintah perlu dijalin untuk peningkatan investasi publik.

Dengan menggunakan analisis indeks ketimpangan Entropi Theil akan dapat diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah. Dari hasil perhitungan Indeks Entropi Theil ini akan didapatkan tingkat ketimpangan antar wilayah. Jika Indeks Entropi Theil semakin besar menunjukan ketimpangan juga semakin besar (tidak merata) dan apabila Indeks Entropi Theil semakin kecil maka ketimpangan semakin rendah (semakin merata). Dari uraian diatas Indeks Entropi Theil sejalan dengan Indeks Williamson.

Daerah berkembang cepat di Kabupaten Banjarnegara pada pariode penelitan sebanyak 2 kecamatan. Kecamatan yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat berkembang adala Kecamatan Mandiraja dan Wanadadi. Kecamatan Mandiraja rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7,83 persen dengan pendapatan per kapita Rp1.857.924 dan Kecamatan Wanadadi rata-rata pertumbuhan sebesar 4,67 persen dan pendapatan per kapita Rp2.146.520.

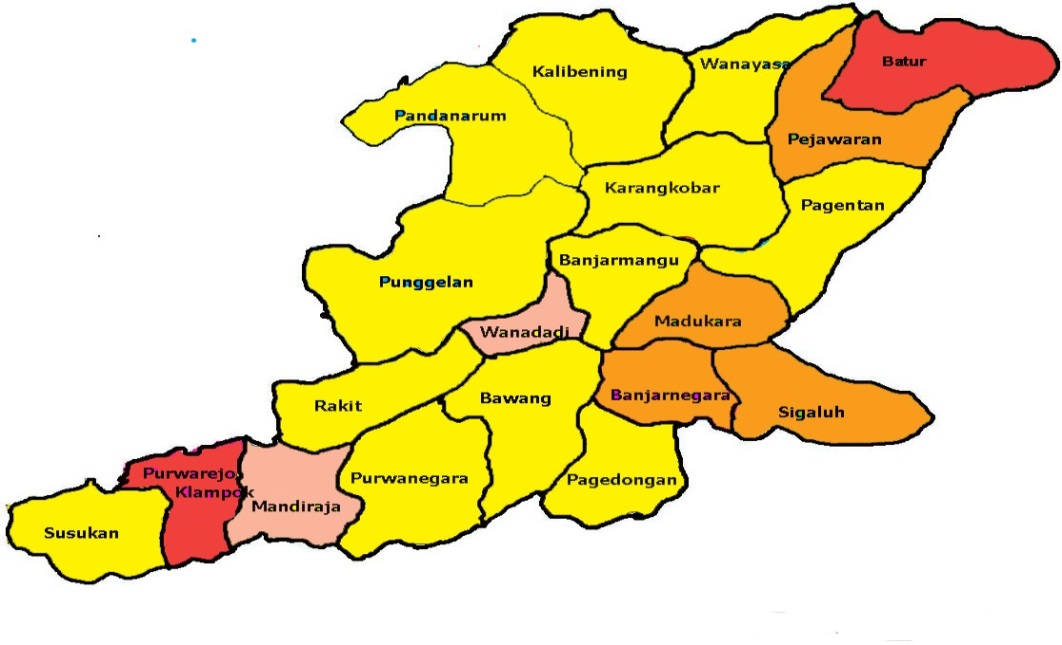
Daerah maju tapi tertekan, kecamatan yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah Kecamatan Purwareja Klampok dan Batur. Kecamatan Purwareja Klampok memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 2,86 persen dan pendapatan perkapita Rp5.194.546 dan pertumbuhan ekonomi ekonomi Kecamatan Batur 3,92 persen dengan pendapatan perkapita Rp5.171.869. Kecamatan yang termasuk klasifikasi ini mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten tetapi tingkat ekonominya masih relatif rendah. Kecamatan ini memerlukan investasi dan promosi untuk dapat mempercepat produktivitasnya sehingga tingkat ekonominya bisa lebih baik.

Daerah relatif tertinggal di Kabupaten Banjarnegara pada periode penelitiam (2002-2011) sebanyak 12 kecamatan atau 60 persen. Yang termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal adalah Kecamatan Susukan, Purwanegara, Bawang, Pagedongan, Banjamangu, Rakit, Punggelan, Karangkobar, Pagentan, Wanayasa, Kalibening dan Pandanarum. Kecamatan yang termasuk klasifikasi tertinggal ini artinya tingkat produktivitasnya lebih rendah dan kesejahteraannya juga lebih rendah. Kecamatan tersebut perlu mempercepat tingkat produktivitasnya dengan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki agar dapat menjadi daerah yang berkembang cepat. Strategi yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonominya adalah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan harus mengendalikan pertumbuhan penduduknya.

**Tabel 1. Tabel Rata-rata Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi**

**Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002-2011**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Rata-rata Pendapatan Perkapita (Rp) | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| 1 | Susukan | 1,420,157 | 3.32 |
| 2 | Purwareja Klampok | 5,194,546 | 2.86 |
| 3 | Mandiraja | 1,857,924 | 6.33 |
| 4 | Purwanegara | 1,933,800 | 3.00 |
| 5 | Bawang | 1,762,433 | 1.37 |
| 6 | Banjarnegara | 4,342,989 | 6.06 |
| 7 | Pagedongan | 715,136 | 1.59 |
| 8 | Sigaluh | 2,697,404 | 5.92 |
| 9 | Madukara | 2,821,485 | 7.83 |
| 10 | Banjarmangu | 2,136,354 | 4.00 |
| 11 | Wanadadi | 2,146,520 | 4.67 |
| 12 | Rakit | 1,495,323 | 1.94 |
| 13 | Punggelan | 1,136,802 | 2.41 |
| 14 | Karangkobar | 2,266,411 | 3.73 |
| 15 | Pagentan | 1,367,379 | 1.15 |
| 16 | Pejawaran | 3,659,806 | 7.91 |
| 17 | Batur | 5,171,869 | 3.92 |
| 18 | Wanayasa | 2,099,523 | 1.36 |
| 19 | Kalibening | 1,646,298 | 3.19 |
| 20 | Pandanarum | 756,847 | 4.00 |
|  | Banjarnegara | **2,355,427** | **4.08** |



Sumber BPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002-2011,data diolah

**Gambar 1. Peta Tipologi Klassen Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002-2011**

**2. Tingkat Ketimpangan Regional Antar Daerah**

Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan pembangunan belum dapat dipecahkan khususnya pada negara-negara sedang berkembang. Ketimpangan wilayah ini terjadi dikarenakan perbedaan karakteristik antar daerah yang menyebabkan satu atau beberapa daerah lebih unggul atau maju dibandingkan daerah lain. Ketimpangan dalam pendapatan adalah ketimpangan dalam pembangunan antar wilayah di Kabupaten Banjarnegara yang menyebabkan pula ketimpangan dalam tingkat pendapatan perkapita antar wilayah kecamatan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber alam dan perbendaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah (Syafrizal, 2008).

Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dangan wilayah yang terbelakang atau kurang maju.Untuk menganalisis besarnya ketimpangan pendapatan perkapita antar kecamatan di Kabupaten Banjarnegara digunakan analisis *Indeks Williomson* dan *Indeks Entropi Theil*. Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu kabupaten tertinggal di Jawa Tengah dan masih memiliki tingkat ketimpangan yang berat selama masa penelitian mulai tahun 2002-2011. Hasil penghitungan tingkat ketimpangan pendapatan perkapita selama periode penelitan adalah sebagai berikut tabel 2.

**Tabel 2. *Indeks Williomson* dan *Indeks Entropi Theil* Kabupaten Banjarnegara 2002-2011**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Indeks Williomson | Indeks Entropi Theil |
| 1 | 2002 | 0,5415 | 1,2991 |
| 2 | 2003 | 0,5449 | 1,2955 |
| 3 | 2004 | 0,5684 | 1,3803 |
| 4 | 2005 | 0,5708 | 1,3718 |
| 5 | 2006 | 0,5782 | 1,3424 |
| 6 | 2007 | 0,5235 | 1,3395 |
| 7 | 2008 | 0,5338 | 1,3843 |
| 8 | 2009 | 0,5389 | 1,3724 |
| 9 | 2010 | 0,5424 | 1,3658 |
| 10 | 2011 | 0,5432 | 1,3642 |
| Rata-rata | | 0,5486 | 1,3515 |

Sumber : BPS Kabupaten Banjarnegara 2002-2011,

data diolah

Tingkat ketimpangan diukur dengan menggunakan pengukuran pendapatan perkapita. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Banjarnegara cenderung naik. Pengukuran ketimpangan pendapatan perkapita dilakukan selama 10 tahun, untuk tahun 2002-2003 meliputi 18 kecamatan dan tahun 2004-2011 meliputi 20 kecamatan karena pada tahun 2004 Kabupaten Banjarnegara melakukan pemekaran dengan tambahan Kecamatan Pagedongan dan Pandanarum.

Dari hasil penghitungan selama periode penelitian 2002-20011 diperoleh perbedaan angka ketimpangan dengan menggunakan alat analisis yang berbeda. Hasil perhitungan tesebut mempunyai pola yang sama, bahwa antar kecamatan di Kabupaten Banjarnegara terjadi ketimpangan pendapatan. Berdasarkan penghitungan *Indeks Williomson* pada tahun 2002 angka ketimpangannya sebesar 0,5415, tahun 2003 sebesar 0,5449, tahun 2004 sebesar 0,5684, tahun 2005 sebesar 0,5708 dan pada tahun 2006 sebesar 0,5782. Selama lima tahun pertama penelitian di Kabupaten Banjarnegara angka ketimpangan dengan menggunakan alat analisis *Indeks Williomson* mengalami kenaikan, dan nilai kenaikan yang bertinggi pada tahun 2006. Selama periode penelitian (2002-2011) hanya terjadi sekali penurunan nilai *Indeks Williomson* yaitu pada tahun 2007 sebesar 0,5235. Empat tahun berikutnya (2008-2011) nilai *Indeks Williomson* cenderung mengalami kenaikan sampai akhir periode penelitian.

Rata-rata nilai angka Indeks Williomson di Kabupaten Banjarnegara selama periode penelitian (2002-2011) sebesar 0,5486, nilai ini tergolong dalam kriteria berat (>0,50). Dari hasil penghitungan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa angka ketimpangan pendapatan perkapita antar kecamatan di Kabupaten Banjarnegara masuk dalam katagori ketimpangan berat. Hal ini menunjukan bahwa perbedaan pendapatan perkapita antar kecamatan di Kabupaten Banjarnegara adalah tinggi atau kriteria ketimpangan antar kecamata tergolong berat.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui ketimpangan suatu daerah selain menggunakan *Indeks Williomson* juga digunakan alat analisis yang lain yaitu Indeks *Entropi Theil*. Hasil penghitungan menggunakan *Indeks EntropiTheil* angka ketimpangan berfluktuasi, tetapi secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 sebesar 1,2991 dan meningkat sampai pada tahun 2004 sebesar 1,3803 dan kenaikan juga terjadi pada tahun 2007 sebesar 1,3395 dan pada tahun 2008 menjadi 1,3843. Dalam menganalisis nilai angka *Indeks Entropi Theil* ini tidak memiliki batas atas atau batas bawah, disebut terjadi ketimpangan jika dalam periode penelitian terjadi kecenderungan untuk meningkat. Sehingga dari hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukan bahwa di Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan alat analisis *Indeks Entropi Theil* juga dikatakan mengalami ketimpangan pendapatan antar kecamatan dalam katagori berat.

Ketimpangan di Kabupaten Banjarnegara disebabkan oleh 3 faktor yang paling dominan menyebabkan ketimpangan antar wilayah adalah tingkat mobilitas faktor produksi, perbedaan sumber daya alam, dan perbedaan kondisi demografis. Disamping ke tiga hal tersebut orientasi pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengarahkan dan mengoptimalkan sumber daya alam pada daerah-daerah tertentu dan dalam pengalokasian anggaran belanja daerah yang tidak mempertimbangkan kondisi, keragaman dan kompleksitas masing-masing daerah juga memicu dan mendorong terjadinya ketimpangan, daerah yang maju tetap maju dan daerah yang tertinggal semakin tertinggal.

**3. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Banjarnegara**

Lima tahun setelah krisis ekonomi di Indonesia, pada awal penelitaian yaitu tahun 2002 Kabupaten Banjarnegara masih mengalami dampak dari krisis ekonomi tersebut, hal ini dapat dilihat dari perkembangan laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang rendah. Pada tahun 2002, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara adalah pertumbuhan yang paling rendah selama periode penelitan yaitu sebasar 0,85 persen dan dengan Indeks ketimpangan Williamson sebesar 0,5415 sebesar. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tertertinggi selama periode penelitian adalah pada tahun 2009 sebesar 5,11 persen.

Pada tahun 2009 keadaan perekonomian di Kabupaten Banjarnegara stabil dengan tingkat inflasi sebesar 4,37 persen, dengan tingkat inflasi yang kecil tersebut membuat investor dan pelaku usaha dapat memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Sektor yang mengalami pertumbuhan yang besar adalah sektor pertanian, konstruksi, perdagangan dan jasa. Dengan berfluktuasinya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun sampai dengan pertumbuhan tertinggi tahun 2009, juga diikuti naiknya Indeks Williamson. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara pada saat periode penelitian juga menunjukan arah ketimpangannya. Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Banjarnegara juga mengikuti pola pertumbuhan ekonominya. Di Kabupaten Banjarnegara pada periode penelitian tahun 2002 – 2011 data pertumbuhan ekonomi, indeks ketimpangan *Wiliiomson* dan *entropi Theil* sebagai berikut tabel 3.

**Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi,Indeks Ketimpangan Williomson dan Indeks Entropi Theil Kabupaten Banjarnegara**

**2002-2011**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Pertumb Ekonomi  (%) | Indeks Williomson | Indeks Entropi Theil |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| 1 | 2002 | 0,85 | 0,5415 | 1,2991 |
| 2 | 2003 | 2,96 | 0,5449 | 1,2955 |
| 3 | 2004 | 3,81 | 0,5684 | 1,3803 |
| 4 | 2005 | 3,95 | 0,5708 | 1,3718 |
| 5 | 2006 | 4,35 | 0,5782 | 1,3424 |
| 6 | 2007 | 5,01 | 0,5235 | 1,3395 |
| 7 | 2008 | 4,98 | 0,5338 | 1,3843 |
| 8 | 2009 | 5,11 | 0,5389 | 1,3724 |
| 9 | 2010 | 4,89 | 0,5424 | 1,3658 |
| 10 | 2011 | 4,92 | 0,5432 | 1,3642 |
| Rata-rata | | 4,08 | 0,5486 | 1,3515 |

**Gambar 2. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan KetimpanganIndeks Williamson**

Pada tahun 2007 Indeks Williamson sebesar 0,5235, bila dibandingkan dengan Indeks Williamson tahun 2008 sebesar 0,5782 maka pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar sebesar 9,46 persen. Pada tahun 2008 Indeks Williamson naik, artinya terjadi peningkatan kesenjangan pendapatan perkapita wilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Indeks Williamson di Kabupaten Banjarnegara secara rata-rata sebesar 0,5486 masih termasuk ketimpangan yang tinggi, karena mendekati satu. Hal yang sama polanya juga ditunjukan oleh penghitungan ketimpangan dengan menggunakan Indeks Entropi Theil, pada periode awal penelitian sampai dengan akhir periode menunjukan kecenderungan meningkat. Rata –rata Indeks Entropi Theil selama periode penelitian adalah sebesar 1,3515. Karena Indeks Entropi Theil tidak ada batas atas dan bawah, untuk melihat hasil hanya mencermati kalau nilainya semakin besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka ketimpangan semakin tinggi.

**Gambar 3. Indeks Entropi Theil Kabupaten Banjarnegara 2002-2011**

Dari hasil perhitungan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara dari kedua alat yang digunakan ternyata yang signifikan adalah Indeks Ketimpangan Entropi Theil. Hasil penghitungan korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan Indeks Entropi Theil dengan menggunakan SPSS didapat hasil bahwa dari penghitungan koefisien korelasi di dapat angka sebesar 0,827 dengan tingkat signifikasi 0,01, karena koefisien korelasi semakin mendekati 1 maka pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan memiliki hubungan yang erat atau kuat. Koefisien korelasi bertanda positif artinya jika pertumbuhan ekonomi tinggi maka ketimpangan pendapatan juga akan meningkat. Keadaan demikian karena merupakan *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, pemerintah daerah cenderung beorientasi pada pertumbuhan yang tinggi sehingga tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan yaitu semakin besarnya ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat.

**KESIMPULAN**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara secara rata-rata selama periode penelitian sebesar 4,08 persen dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp2.479.507,26 juta rupiah. Hal ini menunjukan perekonomian di Kabupaten Banjarnegara tumbuh dengan baik, tetapi perlu perhatian dari pemerintah daerah untuk lima tahun kedepan, karena ada kecenderungan terjadi pelambatan.

Wilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara pada periode penelitian antara tahun 2002 sampai dengan 2011 menurut analisis Tipologi Klassen termasuk daerah tertinggal sebanyak 60 persen, daerah maju dan tumbuh cepat sebanyak 40 persen, daerah cepat maju sebanyak 10 persen dan daerah maju tapi tertekan sebanyak 10 persen.

Disparitas PDRB per kapita antar kecamatam di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 2002- 2011 termasuk kriteria ketimpangan tinggi. Indek Williamson secara rata-rata sebesar 0,5486 semakin mendekati angka satu, yang berarti telah terjadi suatu tingkat disparitas yang tinggi yang terjadi pada PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Pada tahun 2002 Indeks Williamson sebesar 0,5415 kemudian naik dan puncaknya pada tahun 2006 menjadi sebesar 0,5782 dan ada kecenderungan naik dari tahun 2007 sampai akhir periode penelitan 2011. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan dikhawatirkan terjadi ketimpangan yang melebar pada periode yang akan datang, yang ditunjukkan oleh kecenderungan trend disparitas PDRB per kapita yang terus meningkat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011

**DAFTAR PUSTAKA**

Arsyad, Lincolin, 2005. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah,* BPFE, Jogjakarta.

BPS Kabupaten Banjarnegara. 2011. *Pendapatan Regional Bruto Kabupaten Banjarnegara* , Buku

BPS Kabupaten Banjarnegara. 2000-2011. *Daerah Dalam Angka* , Buku

BPS Kabupaten Banjarnegara. 2005-2011. *Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Banjarnegara* , Buku

Kuncoro, Mudrajad, 2012, *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal,Kota, dan Kawasan?.* Salemba Empat. Jakarta.

Sjafrizal, 1997, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional WilayahIndonesia Bagian Barat*, Jakarta, Jurnal Buletin Prisma

Tambunan, Tulus T.H. (2001), *Transformasi Ekonomi di Indonesia Teori & Penemuan Empiris*, Jakarta: Salemba Empat.